

**PELAKSANAAN PRINSIP PARTISIPASI, TRANSPARANSI, DAN
AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAHAN NAGARI KINALI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIS UNP
Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administras
Publik (S.AP)*



Disusun Oleh:

SRI DASA PUTRI WAHYUNI

17042250

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

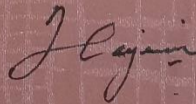
PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Prinsip Partisipasi, Transparansi, Dan
Akuntabilitas Pada Pemerintahan Nagari Kinali
Kabupaten Pasaman Barat
Nama : Sri Dasa Putri Wahyuni
NIM/TM : 17042250/2017
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2021

Disetujui oleh,

Pembimbing



Drs. Karjuni Dt. Maeni, M.Si
NIP. 19630617 198903 100 3

PENGESAHAN TIM PENGUJI

SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada Hari Senin, 16 Agustus 2021 pukul 11.00 WIB - 12.00 WIB

**Pelaksanaan Prinsip Partisipasi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pada
Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat**

Nama : Sri Dasa Putri Wahyuni

NIM/TM : 17042250/2017

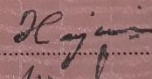
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2021

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	1..... 
2. Anggota	: Drs. M.Fachri Adnan., M.Si., Ph.D	2..... 
3. Anggota	: Dr. Zikri Alhadi., S.IP., MA	3.....

Mengesahkan
Dekan FIS UNP


Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Dasa Putri Wahyuni
TM/NIM : 2017/17042250
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Prinsip Partisipasi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pada Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Sri Dasa Putri Wahyuni

2017/17042250

ABSTRAK

Sri Dasa Putri Wahyuni
2017/17042250

Pelaksanaan Prinsip *Good Governance*
Partisipasi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Di
Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten
Pasaman Barat. Jurusan Ilmu Administrasi
Negara. FIS Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Nagari Kinali dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan Nagari Kinali, transparansi informasi Nagari Kinali masih belum sepenuhnya diketahui dan diakses oleh masyarakat Nagari, dan akuntabilitas pemerintahan Nagari Kinali belum optimal. Oleh karena itu pemerintahan nagari Kinali diharapkan lebih memperhatikan tingkat partisipasi masyarakat guna mewujudkan good governance. Selain itu pemerintah Nagari Kinali diharapkan untuk mempermudah seluruh masyarakat nagari untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan terkait pemerintah nagari. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan berupa evaluasi diharapkan untuk diberitahukan kepada masyarakat tanpa terkecuali. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Prinsip Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pada Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini diolah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Kinali. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Pelaksanaan Prinsip Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pada Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat dapat dikatakan belum terlaksana dengan optimal karena masyarakat masih enggan untuk berpartisipasi, akses mendapatkan informasi Nagari terbatas, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan fungsi pemerintah belum optimal.

Kata Kunci: Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Pemerintahan Nagari

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan berkat dan rahmat serta memberi dorongan yang kuat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Pelaksanaan Prinsip Partisipasi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pada Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat”**.

Tujuan penulis menulis skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam melaksanakan penulisan dan penelitian di lapangan, penulis telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Ganefri,M.Pd.,Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr.Siti Fatimah,M.Pd.,M,Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M,Hum., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. M.Fachri Adnan., M.Si., Ph.D dan Bapak Dr. Zikri Alhadi., S.IP., MA selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua (Bapak PL Sihotang dan Ibu Rosmawati) dan seluruh Keluarga Besar Opung Jonathan Sihotang yang telah memberikan dukungan moril, semangat dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak H. Hartasani, M.Pd selaku PJ Wali Nagari Kinali yang telah memberikan izin untuk penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian.
8. Para informan dari kantor Wali Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat, dan Masyarakat Nagari Kinali yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian.
9. Para informan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Parat yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian.
10. Ketua Badan Musyawarah dan Kerapatan Adat Nagari Kinali yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian.
11. *Member* bolang yang selalu mendukung penulis saat terjadi kesulitan dalam proses penyelesaian skripsi.
12. Keluarga Besar D’Gibs Paviliun yang selalu sedia untuk memberikan hiburan serta bertukar pikiran disaat proses penyelesaian skripsi.

13. Seluruh teman-teman seperjuangan dan untuk keluarga besar Administrasi Publik angkatan 2017 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terimakasih untuk ide-ide, dukungan dan semangatnya.

Penulis

Padang, Agustus 2021

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II	11
TINJAUAN KEPUSTAKAAN	11
A. Kajian Teoritis	11
1. Konsep Good Governance	11
2. Prinsip Partisipasi.....	13
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	16
4. Konsep Pemerintahan Nagari.....	16
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	19
C. Kerangka Konseptual.....	21
BAB III.....	22
METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Informan Penelitian.....	23
E. Jenis dan Sumber Data.....	25

F. Uji Keabsahan Data	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV	33
HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Temuan Umum	33
1. Gambaran Umum Nagari Kinali	33
2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat.....	44
B. Temuan Khusus	47
1. Pelaksanaan Prinsip Partisipasi di Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.....	47
2. Pelaksanaan Prinsip Transparansi di Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.....	59
3. Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas di Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.....	73
C. Pembahasan.....	82
BAB V	92
PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian.....	24
Tabel 2. Pembangunan Fisik Nagari Kinali Tahun 2020	75
Tabel 3. Dana Nagari Kinali Tahun Anggaran 2020	81
Tabel 4. Anggaran Yang Dikelola Nagari Kinali Tahun 2021	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	21
Gambar 2. Struktur Organisasi.....	43
Gambar 3. Struktur Organisasi.....	46
Gambar 4. Musyawarah Nagari	49
Gambar 5. Musyawarah Nagari mengenai penerima mamfaat BLT	50
Gambar 6 Website nagarikinali.desa.id diakses pada bulan Maret.....	61
Gambar 7 Website nagarikinali.desa.id diakses pada bulan Juni.....	61
Gambar 8. Baliho mengenai informasi anggaran pemerintah nagari yang berada di kantor wali nagari.....	62
Gambar 9. Kejurongan bancah kariang tidak publish baliho mengenai anggaran nagari .	63
Gambar 10. pelaksanaan kegiatan launching BLT Dana Desa di Nagari Kinali	65
Gambar 11. Kegiatan rapat terkait penerima mamfaat BLT dana desa.....	66
Gambar 12. Informasi jadwal pembayaran Bantuan Sosial Tunai.....	67
Gambar 13. Informasi Pelayanan Administrasi yang disampaikan melalui facebook Nagari Persiapan Tandikek	71
Gambar 14. Pelayanan Administrasi di Kantor Wali Nagari Kinali	77
Gambar 15. Jadwal Pelayanan di Kantor Wali Nagari Kinali	78
Gambar 16. Suasana Nagari Kinali saat jam istirahat telah selesai	78

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nagari merupakan desa adat yang menduduki unit pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari sebagai unit pemerintahan terendah di provinsi Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Nagari berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga Nagari berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya. Dengan demikian, pemerintahan Nagari dapat mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau serta peranan lembaga adat dan lainnya sebagai mitra dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Helmi, 2004:14).

Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 kenagarian, salah satunya adalah Nagari Kinali. Nagari Kinali memiliki luas 387,60 km² dengan 17 kejurongan. Nagari Kinali berpenduduk 69.305 jiwa (2017) dengan beragam etnis suku didalamnya. Dengan jumlah 69.305 penduduk Nagari Kinali, nagari ini termasuk padat penduduk untuk ukuran sebuah desa. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, nagari Kinali di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.

Pelaksanaan pemerintahan di Nagari sering ditemukan masalah. Tidak jauh berbeda dengan pemerintahan pusat, kualitas sumber daya manusia menjadi masalah yang dapat menghambat lancarnya sistem pemerintahan nagari. Masih banyak fungsi pemerintah yang belum terlaksana dengan optimal di Pemerintahan Nagari Kinali, dimana fungsi

pemerintahan itu antara lain pelayanan, peraturan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan. Kemampuan strategis yang dimiliki pemerintahan Nagari lemah baik dalam membangun kemampuan kelembagaan, network, pemamfaat lingkungan yang kondusif maupun dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Nagari. Pelayanan publik yang kurang optimal juga ditemukan di Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan Bapak Bagus selaku Kasi Pemeintahan pada Hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pukul 11.00 WIB menyatakan bahwa:

“Nagari Kinali memiliki kurang lebih 70.000 jumlah penduduk menurut BPS Pasaman Barat. Masyarakat nagari Kinali merupakan masyarakat heterogen karena terdiri dari banyak etnis suku diantaranya Minang, Jawa, Batak. Jika kita lihat kota Padang Panjang dengan 54.421 penduduk, nagari Kinali dapat dikatakan sebagai desa dengan jumlah penduduk yang besar. Setiap hari wali nagari menerima banyak kunjungan masyarakat yang ingin mengurus surat, bantuan, dan kebutuhan lainnya. Sehingga pelayanan kurang optimal dari segi waktu. Misalnya saja dalam mengurus surat, masyarakat harus sabar menunggu karena melewati beberapa proses prosedur serta antrian masyarakat yang lain. Estimasi waktu sekitar 1,5 jam. Dimana proses prosedurnya dari adanya surat pengantar dari pihak kejurongan – masyarakat ke pihak administrasi di kantor wali nagari– verifikasi oleh pihak register – paraf KAUR (Kepala Urusan) umum – paraf Sekretaris Nagari – paraf Wali Nagari – surat keluar – surat diterima masyarakat. Selain itu, aparatur pelayanan wali nagari kinali juga terbilang kurang untuk menghadapi masyarakat banyak. Sehingga sering ditemukannya kekurangan.” (Bapak Bagus selaku Kasi Pemerintahan Nagari Kinali tanggal 16 Maret 2021)

Dari hasil wawancara diatas bersama bapak Bagus selaku Kasi Pemerintahan di kantor Wali Nagari Kinali, dapat kita ketahui masih banyak kendala mewujudkan pelayanan dan pemerintahan yang baik. Sistematis dalam pelayanan yang rumit membuat pelayanan lama sehingga banyak masyarakat yang mengeluh dan enggan untuk mengurus ke kantor wali nagari kinali. Untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik serta mengatasi permasalahan dalam pemerintahan nagari diperlukannya pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*. Apa itu *Good Governance*? *Good Governance* merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan pengelolaan administrasi publik saat ini dan sejalan dengan prinsip demokrasi serta alokasi dana investasi yang tepat sasaran dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

Dalam *good governance* terdapat prinsip-prinsip yang menjadi indikator penilai. Prinsip-prinsip *good governance* yang dikemukakan UNDP (*United Nations Development Program*) pada tahun 1997, diantaranya partisipasi, taat hukum (*rule of law*), transparansi/keterbukaan, responsif, beorientasi kesepakatan (*consensus orientation*), kesetaraan/keadilan (*equity*), efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas, dan visi strategis. Partisipasi, Transparansi, dan akuntabilitas merupakan beberapa prinsip *good governance* yang menjadi masalah yang krusial dalam penerapan *good governance* di Nagari Kinali.

Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat disuatu daerah (Nagari Kinali) dalam segala kegiatan pemerintahan untuk mencapai

tujuan tertentu baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat yang diharapkan pada sebuah nagari adalah ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan nagari melalui musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan nagari) dan ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Namun masih banyak ditemukan pada masyarakat Nagari yang apatis terhadap kegiatan atau program dari pemerintahan nagari Kinali. Mengapa demikian? Apa yang membuat ketidaktertarikan masyarakat untuk ikut serta? Apakah pemerintah yang tidak mewadahi untuk masyarakat berpartisipasi atau memang tidak diikutsertakan karena alasan internal? Namun dapat kita lihat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kian menurun hal ini disebabkan oleh penyimpangan yang selalu dilakukan oleh oknum pemerintahan seperti korupsi uang negara, perlakuan tidak adil terhadap masyarakat, pembangunan wilayah tidak merata sehingga ketidakseimbangan perekonomian kian tampak.

Partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh keterbukaan pemerintah dalam aspek informasi pelayanan, anggaran, pembangunan, bantuan dan lainnya. Namun pada kenyataannya di Nagari Kinali sendiri sering ditemukan keterbatasan akses informasi sehingga masyarakat meraba-raba dalam mencari informasi yang mereka butuhkan. Transparansi/keterbukaan adalah prinsip *good governance* yang mendukung untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif atas golongan tertentu.

Namun pada nagari Kinali, peneliti masih menemukan masyarakat yang keliru bahkan tidak tahu akan informasi mengenai program pemerintahan nagari, bahkan informasi yang benar sudah jarang ditemukan, karena tidak ada komunikasi atau sosialisasi langsung dari pemerintah.

Melihat partisipasi masyarakat yang kurang, serta transparansi informasi di Nagari Kinali yang belum optimal, dapat mempengaruhi tingkat tanggung jawab atau akuntabilitas dari pemerintah nagari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *good governance* yang paling penting, dimana tata kelola yang baik akan menjamin pertanggungjawaban yang baik pula (Adnan, dkk, 2019:41). Dari teori diatas, dengan realita yang terjadi dipemerintahan nagari Kinali, dapat dipahami bahwa akuntabilitas pemerintah masih kurang optimal. Salah satu contoh tanggung jawab yang terabaikan oleh pemerintah nagari Kinali adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai tanggung jawab serta fungsi nagari sebagai pemerintah masih belum menghasilkan masyarakat yang berdaya, kreatif, dan madani. Namun program pemberdayaan dapat dikatakan hanya sebagai pajangan saja dan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat Kinali secara luas.

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 4 (huruf f,h, dan i) tentang Desa menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisiensi, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; mengelola administrasi pemerintahan

desa yang baik; dan mengelola keuangan dan asset desa secara baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa termasuk pemerintahan nagari sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat sangat diperlukan.

Pembentukan pemerintahan nagari dilaksanakan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nagari, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan serta daya saing nagari. Sehingga nagari dapat menjadi garda terdepan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun pada praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan nagari Kinali masih belum dapat dikategorisasikan sebagai pemerintah yang partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Melihat permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan melihat lebih lanjut mengenai **“Pelaksanaan Prinsip Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pada Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat Nagari Kinali dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan nagari;

2. Transparansi/keterbukaan informasi mengenai seluruh kegiatan pelaksanaan pemerintahan nagari masih belum sepenuhnya diketahui masyarakat nagari;
3. Akuntabilitas sebagai indikator pemerintahan yang baik di Nagari Kinali belum optimal;
4. Pengembangan ketiga sektor atau sub domain *good governance* (pemerintah, swasta dan masyarakat) belum seimbang di Kantor Wali Nagari Kinali;

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah dengan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prinsip partisipasi di Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pelaksanaan prinsip transparansi di Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
3. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas di Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat;

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip partisipasi di Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat?

2. Bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi di Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana pelaksanaan prinsip akuntabilitas di Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Pelaksanaan prinsip *Good Governance* Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Di Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
2. Mengidentifikasi kendala dalam Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Di Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat;
3. Mengidentifikasi solusi dalam mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Di Pemerintahan Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermamfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan administrasi publik,

khususnya yang berkaitan dengan Pemerintahan Nagari, Pemerintahan Daerah, Perilaku Organisasi, serta Birokrasi dan Governansi Publik.

2. Secara praktis:

- a. Bagi pengambil kebijakan penelitian ini dapat dijadikan solusi dalam mengatasi permasalahan dalam pemerintahan nagari Kinali;
- b. Bagi lembaga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan masukan bagi lembaga terutama pada pemerintahan nagari;
- c. Bagi peneliti lanjutan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.